



Judul : RDPU dengan Amsal Sitepu, komisi III harapkan keadilan substantif
Tanggal : Rabu, 01 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RDPU Dengan Amsal Sitepu Komisi III Harapkan Keadilan Substantif

KEMARIN, Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Christy Sitepu yang dituduh melakukan korupsi anggaran proyek video profil desa. Hasilnya, Komisi Hukum DPR mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengedepankan keadilan substantif.

Ketua Komisi III DPR Habiburrahman meminta aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik dalam penanganan kasus Amsal Christy Sitepu. Pendekatan hukum dalam perkara tersebut perlu mempertimbangkan berbagai fakta persidangan dan karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif.

Dia mengingatkan, penanganan perkara yang melibatkan kerja kreatif seperti produksi video tidak dapat disamakan dengan sektor yang memiliki standar harga baku. Karena itu, penilaian terhadap dugaan kerugian negara, perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

"Langkah penegakan hukum perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim industri kreatif," ujar Habiburrahman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Diketahui, Amsal Christy Sitepu merupakan Direktur CV Promiseland yang mengajukan proposal pembuatan video profil kepada sejumlah kepala desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam perkara ini, ia dinilai melakukan penggelembungan anggaran (mark-up)

dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Saat ini, kasus tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Berdasarkan dokumen di PN Medan, biaya pembuatan video profil desa yang ditawarkan Amsal melalui perusahaannya mencapai Rp 30 juta per desa. Namun, berdasarkan analisis ahli dan auditor Inspektorat Kabupaten Karo, harga wajar satu video profil desa diperkirakan sebesar Rp 24,1 juta. Dari selisih tersebut, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp 202 juta.

Habiburrahman melanjutkan, Komisi Hukum DPR mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Namun, upaya tersebut tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemidanaan, tapi juga memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. "Kami meminta agar proses hukum yang berjalan tidak menimbulkan preseden yang justru menghambat perkembangan sektor industri kreatif," ucapnya.

Ia menegaskan, RDPU kasus yang menjerat Amsal Christy Sitepu bukanlah bentuk intervensi terhadap proses hukum, tapi bagian dari fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Sebab pihaknya tetap menghormati independensi hakim.

DPR, kata dia, tidak memiliki prasangka buruk terhadap lembaga peradilan dan meyakini hakim akan mengambil keputusan yang adil. Karena itu, putusan pengadilan diharapkan akan mencerminkan rasa keadilan. ■ TIF